

IMPLEMENTASI KURIKULUM EDUTECHNO PRENEURSHIP ISLAMI DI SMK NEGERI 3 LHOKSEUMAWE: PEMBENTUKAN KARAKTER DAN PENINGKATAN KOMPETENSI PESERTA DIDIK

Muklir

*Pascasarjana Administrasi Publik, Fisipol, Universitas Malikussaleh, Indonesia
muklir@unimal.ac.id*

Muhammad Hasyem

*Administrasi Publik, Fisipol, Universitas Malikussaleh, Indonesia
mhasyem@unimal.ac.id*

Teuku Alfiady

*Administrasi Publik, Fisipol, Universitas Malikussaleh, Indonesia
alfiady@unimal.ac.id*

Murniati

*Administrasi Publik, Fisipol, Universitas Malikussaleh, Indonesia
murniati@unimal.ac.id*

Abdullah

*Pascasarjana Administrasi Publik, Fisipol, Universitas Malikussaleh, Indonesia
ruslimanyak@gmail.com*

Abstract

This study aims to understand the implementation of the Islamic Edutechno Preneurship Curriculum at SMK Negeri 3 Lhokseumawe and its impact on character building and skill enhancement of students. Using qualitative methods, including in-depth interviews, observations, and document analysis, the research involved various stakeholders at the school. Results show that SMK Negeri 3 Lhokseumawe has established a School Development Team (TPS) to implement strategic steps in applying this curriculum. Programs such as Mandatory Scouting (Wapra) and Islamic Spirituality (Rohis) are integral to these efforts, focusing on the development of Islamic character and the integration of noble moral values in every lesson. Teacher competency is enhanced through In-House Training and Workshops, aiding in the development of both pedagogical and professional

skills. The curriculum's implementation is also supported by the Aceh Education Department's socialization efforts. However, challenges remain, such as insufficient cooperation among teachers in enforcing discipline and the lack of textbooks integrated with the new curriculum. Overall, the implementation of the Islamic Edutechno Preneurship Curriculum at SMK Negeri 3 Lhokseumawe shows positive development. This curriculum has great potential to improve students' skills and Islamic character, preparing them for future challenges. This study provides valuable insights for the development of character-based and technopreneurship curricula in vocational education settings.

Keywords: *Islamic Edutechno Preneurship Curriculum, character building, competency, SMK Negeri 3 Lhokseumawe, vocational education.*

A. Pendahuluan

Kurikulum pertama di Indonesia diterbitkan setelah kemerdekaan negara pada tahun 1947, dikenal sebagai Rentjana Pelajaran 1947, dan mulai diterapkan pada tahun 1950. Sejak itu, kurikulum pendidikan di Indonesia terus mengalami perubahan dan perkembangan, sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik, yang beralih dari orientasi pendidikan kolonial Belanda ke kepentingan nasional. Hingga saat ini, kurikulum yang digunakan adalah Kurikulum 2013. Menurut Hidayat (2013:39) dalam bukunya "Pengembangan Kurikulum Baru", Kurikulum 2013 berorientasi pada peningkatan dan keseimbangan antara kompetensi sikap (attitude), keterampilan (skill), dan pengetahuan (knowledge).

Kurikulum 2013 memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Salah satu kelebihanannya, dilihat dari faktor internal, adalah harapan bahwa peserta didik dapat memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang cukup untuk bersaing di dunia internasional. Kurikulum ini bertujuan untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga terampil dan berkarakter.

Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) menjadi dasar hukum utama bagi pemerintahan Aceh dalam menerapkan aspek-aspek khususnya. Undang-undang ini dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang tersebut memberikan wewenang kepada Aceh untuk mengatur dan menyelenggarakan pendidikan serta mengalokasikan sumber daya manusia potensialnya.

Dalam undang-undang tersebut, khususnya pada Pasal 16 Ayat 1 dan Ayat 2, dijelaskan bahwa Aceh dapat menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan menambahkan materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam. Hal ini memungkinkan Aceh untuk mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam kurikulumnya, sehingga pendidikan di Aceh tidak hanya berfokus pada aspek akademis tetapi juga pada penguatan nilai-nilai religius dan budaya lokal. Pengembangan kurikulum terintegrasi memberikan kesempatan pada daerah untuk mengembangkan konsep kearifan lokal agar tetap terjaga sekaligus mampu meningkatkan kualitas pendidikannya, kurikulum

yang sedang dikembangkan di propinsi Aceh saat ini disebut Edutechno Preneurship Islami.

Kurikulum Edutechno Preneurship Islami adalah konsep kurikulum baru di Aceh yang diimplementasikan pada satuan pendidikan menengah kejuruan. Ini merupakan kurikulum integrasi pertama yang digunakan di Aceh. Oleh karena itu, belum ada penelitian yang secara khusus membahas kurikulum ini, apalagi yang menghubungkannya dengan administrasi publik. Penelitian terdahulu tentang implementasi kurikulum hanya membahas aspek implementasi secara umum tanpa menyentuh aspek spesifik dari Kurikulum Edutechno Preneurship Islami. Berdasarkan uraian di atas, penting untuk mengetahui lebih lanjut tentang "Implementasi Kurikulum Edutechno Preneurship Islami". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kurikulum ini diterapkan dan apa saja tantangan serta peluang yang dihadapinya, terutama dalam konteks administrasi publik di Aceh.

B. Review Literatur

Implementasi Kebijakan Publik

Van Meter dan Van Horn, seperti yang dikutip dalam Budi Winarno (2008), mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menindaklanjuti keputusan-keputusan sebelumnya. Implementasi kebijakan ini melibatkan proses yang kompleks, termasuk perumusan, penerapan, dan evaluasi, yang semuanya bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh kebijakan tersebut.

Berdasarkan definisi ini, dapat disimpulkan bahwa setiap tahap dalam implementasi kebijakan harus secara langsung dievaluasi oleh pihak-pihak terkait. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi potensi, kekuatan, dan kelemahan dari setiap tahap pelaksanaan. Dengan demikian, perbaikan dapat segera dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas kebijakan tetapi juga memastikan bahwa sumber daya yang digunakan dalam implementasi dimanfaatkan secara optimal.

Konten Kebijakan Publik

Merike S. Grindle, dalam Nugroho (2003), menyatakan bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilan implementasi ini ditentukan oleh konten kebijakan serta konteks di mana kebijakan tersebut diterapkan. Derajat keberhasilan implementasi atau "implementability" dari kebijakan tersebut menjadi faktor kunci dalam menilai efektivitasnya. Konten kebijakan yang relevan mencakup berbagai elemen yang harus dipertimbangkan untuk memastikan kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

Isi kebijakan yang dimaksud oleh Grindle mencakup enam elemen penting: (1) kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan; (2) jenis manfaat yang akan dihasilkan oleh kebijakan tersebut; (3) derajat perubahan yang diinginkan; (4) kedudukan pembuat kebijakan dalam struktur kekuasaan; (5) pelaksana program yang bertanggung jawab atas implementasi; dan (6) sumber daya yang dikerahkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Setiap elemen ini berperan penting dalam menentukan sejauh

mana kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Implementasi kebijakan bertujuan agar tindakan atau perilaku masyarakat selaras dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah atau negara melalui kebijakan yang telah ditetapkan. Jika perilaku atau tindakan masyarakat tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka implementasi kebijakan publik akan terhambat dan menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III, yang dikutip oleh Budi Winarno (2002), terdapat beberapa faktor utama yang mendukung implementasi kebijakan. Faktor-faktor ini meliputi: (1) Komunikasi; (2) Sumber-sumber; (3) Kecenderungan atau perilaku; dan (4) Struktur birokrasi. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan tersebar dengan baik dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Sumber-sumber mencakup segala bentuk dukungan yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, termasuk sumber daya manusia, wewenang, dan fasilitas yang mendukung.

Selain komunikasi, sumber daya yang mendukung implementasi kebijakan juga sangat penting. Sumber daya ini tidak hanya melibatkan tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, tetapi juga mencakup wewenang dan fasilitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan. Sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten sangat krusial karena mereka bertanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugas yang telah ditentukan sesuai dengan pokok dan fungsi mereka. Selain itu, wewenang dan fasilitas yang memadai memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lancar dan efisien.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat menghambat implementasi kebijakan publik adalah aspek-aspek yang melekat pada kebijakan itu sendiri, termasuk komunikasi yang tidak efektif, kurangnya sumber daya, kecenderungan perilaku yang tidak mendukung, dan struktur birokrasi yang tidak memadai. Untuk mengatasi hambatan ini, perlu adanya upaya untuk meningkatkan komunikasi, menyediakan sumber daya yang cukup, mengelola perilaku dengan baik, dan memperbaiki struktur birokrasi. Dengan demikian, kebijakan publik dapat diimplementasikan secara efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan (Winarno, 2002).

Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan bagian integral dari budaya suatu masyarakat dan biasanya diwariskan secara turun-temurun melalui cerita dan petuah dari generasi sebelumnya. Menurut Alfian (2013), kearifan lokal dapat diartikan sebagai pandangan hidup, pengetahuan, dan strategi kehidupan yang diwujudkan dalam aktivitas sehari-hari oleh masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini mencerminkan

bagaimana nilai-nilai dan praktik budaya terus hidup dan berkembang dalam komunitas tertentu.

Berdasarkan pandangan Alfian, kearifan lokal tidak hanya mencakup adat dan kebiasaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya tetapi juga mencerminkan identitas budaya yang kuat. Adat istiadat dan tradisi ini menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat dan terus dipertahankan oleh komunitas hukum adat tertentu di berbagai daerah. Kearifan lokal ini tidak hanya menjadi landasan sosial tetapi juga memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan.

Dalam konteks pendidikan, penting bagi satuan pendidikan untuk memperhatikan kearifan lokal saat menerapkan kurikulumnya. Integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam kurikulum dapat membantu siswa memahami dan menghargai warisan budaya mereka sendiri. Selain itu, ini juga dapat memperkuat identitas budaya dan membangun rasa kebanggaan terhadap tradisi lokal. Oleh karena itu, memasukkan kearifan lokal dalam proses pendidikan tidak hanya membantu dalam pelestarian budaya tetapi juga mendukung pembentukan karakter siswa yang lebih holistik.

Kemajemukan Sosial Pendidikan

Penerapan sebuah kurikulum dalam satuan pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan teori kemajemukan masyarakat, karena proses ini melibatkan interaksi antara berbagai kelompok masyarakat yang beragam. Menurut Simmel dalam Kamil (1999), interaksi sosial adalah hubungan antara dua orang atau lebih di mana perilaku atau tindakan satu individu akan mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki perilaku atau tindakan individu lainnya. Interaksi ini adalah dasar dari dinamika sosial yang kompleks dalam masyarakat majemuk.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa interaksi dan persepsi menjadi elemen kunci dalam mengelola kemajemukan. Penerapan kurikulum Edutechno Preneurship di satuan pendidikan kejuruan di Kota Lhokseumawe harus mempertimbangkan aspek-aspek ini. Peserta didik, guru, dan tenaga pendidikan memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga dalam proses pembelajaran akan terjadi interaksi yang beragam. Hal ini menuntut adanya perhatian khusus dalam penerapan kurikulum agar dapat mengakomodasi kemajemukan dan menciptakan harmoni dalam lingkungan belajar.

Dalam konteks ini, penting bagi penerapan kurikulum dalam pendidikan untuk memperhatikan dan menghargai kemajemukan. Dengan demikian, proses pendidikan tidak hanya sekedar transfer pengetahuan, tetapi juga membangun sinergi antara peserta didik dan tenaga pendidik dengan berbagai latar belakang. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan efektif, di mana setiap individu merasa dihargai dan mampu berkontribusi secara maksimal. Penerapan kurikulum yang memperhatikan kemajemukan akan memperkuat kerjasama dan rasa saling menghormati di antara seluruh anggota komunitas pendidikan.

C. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memahami objek penelitian secara mendalam, mengembangkan konsep sensitivitas terhadap masalah yang dihadapi, menjelaskan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*), serta mengembangkan pemahaman terhadap satu atau lebih fenomena yang dihadapi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang lebih kaya dan kontekstual mengenai topik yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud mendalami, menganalisis, dan mendokumentasikan interaksi manajerial di SMK Negeri 3 Lhokseumawe dalam rangka implementasi Kurikulum Edutechno Preneurship Islami. Analisis tersebut akan dilakukan dari perspektif administrasi publik, yang dipandang sebagai tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan amanah konstitusi Republik Indonesia.

D. Hasil Penelitian

Konten Kebijakan Kurikulum Edutechno Preneurship Islami

Untuk mengetahui konten kebijakan terkait Kurikulum Edutechno Preneurship Islami, peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pihak di SMK Negeri 3 Lhokseumawe. Sebelum wawancara, indikator-indikator yang ingin diketahui dirumuskan terlebih dahulu. Pengamatan selama dua bulan menunjukkan bahwa Kepala Sekolah menerapkan pola pembinaan berkala kepada wakil-wakilnya, guru-guru, dan peserta didik melalui berbagai kegiatan seperti upacara pembinaan senin pagi, rapat rutin, dan pembinaan setelah pembacaan Surah Yasin setiap hari Jumat.

Hasil analisis menunjukkan bahwa SMK Negeri 3 Lhokseumawe telah membentuk Tim Pengembangan Sekolah (TPS). TPS ini bertujuan untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam penerapan kurikulum Edutechno Preneurship Islami dan pembelajaran berbasis karakter Islami kepada peserta didik. Program-program seperti Wajib Pramuka (Wapra) dan Rohani Islam (Rohis) adalah bagian dari upaya ini. Fokus utama TPS adalah pada pembentukan karakter Islami atau akhlak mulia, di mana guru diharapkan mampu mengintegrasikan materi akhlak mulia dalam setiap pembelajaran. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya peserta didik yang memiliki keterampilan sekaligus berakhlak mulia.

Dalam hal peningkatan kompetensi guru, SMK Negeri 3 Lhokseumawe secara aktif mengadakan In House Training dan Workshop. Ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi pedagogik dan profesional guru. Sebagian besar guru di setiap program keahlian telah mampu membuat dan menyelenggarakan pembelajaran berbasis Edutechno Preneurship Islami. Sosialisasi Edutechno Preneurship Islami yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Aceh juga berperan penting dalam mendukung implementasi kurikulum ini. Guru yang mengikuti sosialisasi tersebut memiliki tanggung jawab untuk melakukan diseminasi kepada guru-guru lainnya.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa salah satu faktor pendukung utama penerapan Edutechno Preneurship Islami adalah adanya sosialisasi yang baik kepada sebagian besar guru dan kemampuan mereka untuk mengintegrasikan konsep Islami ke dalam materi pembelajaran. Namun, terdapat hambatan seperti kurangnya kerjasama antar guru dalam penegakan disiplin, yang mengakibatkan penerapan disiplin siswa

tidak konsisten. Selain itu, belum tersedianya buku pelajaran yang terintegrasi dengan kurikulum baru juga menjadi tantangan, sehingga guru harus merevisi bahan ajar yang sudah ada.

Peserta didik juga mulai merasakan dampak positif dari penerapan kurikulum Edutechno Preneurship Islami. Materi-materi keislaman dan keacehan yang diterapkan dalam proses pembelajaran membantu siswa memahami dan mempraktikkan nilai-nilai Islami dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan seperti shalat dzuhur berjamaah dan doa sebelum memulai pelajaran adalah contoh nyata dari upaya ini. Guru juga selalu memberikan motivasi kepada siswa untuk berlaku jujur, disiplin, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya keacehan.

Secara keseluruhan, implementasi kurikulum Edutechno Preneurship Islami di SMK Negeri 3 Lhokseumawe menunjukkan perkembangan yang positif meskipun ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Penerapan kurikulum ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keterampilan peserta didik tetapi juga untuk membentuk karakter Islami yang kuat. Keberhasilan implementasi ini sangat bergantung pada dukungan semua pihak, termasuk guru, siswa, dan pihak sekolah, serta penyediaan sumber daya yang memadai.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kurikulum Edutechno Preneurship Islami

Untuk mengetahui konten kebijakan terkait Kurikulum Edutechno Preneurship Islami, peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pihak di SMK Negeri 3 Lhokseumawe. Sebelum wawancara, indikator-indikator yang ingin diketahui dirumuskan terlebih dahulu. Pengamatan selama dua bulan menunjukkan bahwa Kepala Sekolah menerapkan pola pembinaan berkala kepada wakil-wakilnya, guru-guru, dan peserta didik melalui berbagai kegiatan seperti upacara pembinaan senin pagi, rapat rutin, dan pembinaan setelah pembacaan Surah Yasin setiap hari Jumat.

Hasil analisis menunjukkan bahwa SMK Negeri 3 Lhokseumawe telah membentuk Tim Pengembangan Sekolah (TPS). TPS ini bertujuan untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam penerapan kurikulum Edutechno Preneurship Islami dan pembelajaran berbasis karakter Islami kepada peserta didik. Program-program seperti Wajib Pramuka (Wapra) dan Rohani Islam (Rohis) adalah bagian dari upaya ini. Fokus utama TPS adalah pada pembentukan karakter Islami atau akhlak mulia, di mana guru diharapkan mampu mengintegrasikan materi akhlak mulia dalam setiap pembelajaran. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya peserta didik yang memiliki keterampilan sekaligus berakhlak mulia.

Dalam hal peningkatan kompetensi guru, SMK Negeri 3 Lhokseumawe secara aktif mengadakan In House Training dan Workshop. Ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi pedagogik dan profesional guru. Sebagian besar guru di setiap program keahlian telah mampu membuat dan menyelenggarakan pembelajaran berbasis Edutechno Preneurship Islami. Sosialisasi Edutechno Preneurship Islami yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Aceh juga berperan penting dalam mendukung implementasi kurikulum ini. Guru yang mengikuti sosialisasi tersebut memiliki tanggung jawab untuk melakukan diseminasi kepada guru-guru lainnya.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa salah satu faktor pendukung utama penerapan Edutechno Preneurship Islami adalah adanya sosialisasi yang baik kepada sebagian besar guru dan kemampuan mereka untuk mengintegrasikan konsep Islami ke dalam materi pembelajaran. Namun, terdapat hambatan seperti kurangnya kerjasama antar guru dalam penegakan disiplin, yang mengakibatkan penerapan disiplin siswa tidak konsisten. Selain itu, belum tersedianya buku pelajaran yang terintegrasi dengan kurikulum baru juga menjadi tantangan, sehingga guru harus merevisi bahan ajar yang sudah ada.

Peserta didik juga mulai merasakan dampak positif dari penerapan kurikulum Edutechno Preneurship Islami. Materi-materi keislaman dan keacehan yang diterapkan dalam proses pembelajaran membantu siswa memahami dan mempraktikkan nilai-nilai Islami dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan seperti shalat dzuhur berjamaah dan doa sebelum memulai pelajaran adalah contoh nyata dari upaya ini. Guru juga selalu memberikan motivasi kepada siswa untuk berlaku jujur, disiplin, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya keacehan.

Secara keseluruhan, implementasi kurikulum Edutechno Preneurship Islami di SMK Negeri 3 Lhokseumawe menunjukkan perkembangan yang positif meskipun ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Penerapan kurikulum ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keterampilan peserta didik tetapi juga untuk membentuk karakter Islami yang kuat. Keberhasilan implementasi ini sangat bergantung pada dukungan semua pihak, termasuk guru, siswa, dan pihak sekolah, serta penyediaan sumber daya yang memadai

E. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Kurikulum Edutechno Preneurship Islami di SMK Negeri 3 Lhokseumawe telah menunjukkan hasil yang positif, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Kepala Sekolah dan tim pengajar telah aktif dalam pembinaan berkala dan sosialisasi konsep kurikulum ini. Pembentukan Tim Pengembangan Sekolah (TPS) dan program-program seperti Wajib Pramuka (Wapra) dan Rohani Islam (Rohis) menjadi bagian penting dari upaya penerapan kurikulum ini. Fokus pada pembentukan karakter Islami atau akhlak mulia melalui integrasi materi dalam setiap pembelajaran telah berjalan dengan baik, menciptakan peserta didik yang tidak hanya terampil tetapi juga berakhlak mulia.

Dukungan terhadap peningkatan kompetensi guru melalui In House Training dan Workshop telah membantu dalam menyelenggarakan pembelajaran berbasis Kurikulum Edutechno Preneurship Islami. Sosialisasi yang efektif dari Dinas Pendidikan Aceh juga telah memfasilitasi pemahaman dan penerapan kurikulum ini oleh guru-guru di SMK Negeri 3 Lhokseumawe. Namun, masih ada beberapa hambatan yang perlu diatasi, seperti kurangnya kerjasama antar guru dalam penegakan disiplin dan belum tersedianya buku pelajaran yang terintegrasi dengan kurikulum baru.

Secara keseluruhan, implementasi Kurikulum Edutechno Preneurship Islami di SMK Negeri 3 Lhokseumawe memerlukan dukungan berkelanjutan dan penyempurnaan dalam beberapa aspek untuk mencapai keberhasilan yang lebih besar. Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, termasuk guru, siswa, dan pihak sekolah, serta penyediaan sumber daya yang memadai, kurikulum ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan

keterampilan dan karakter Islami peserta didik, sehingga siap menghadapi tantangan masa depan.

BIBLIOGRAFI

Alfian, Magdalia. (2013). Potensi Kearifan lokal dalam Pembentukan Jati Diri dan Karakter Bangsa. Prosiding The 5 thn ICSSIS; "Ethnicity and Globalization", di Yogyakarta pada tanggal 13-14 Juni 2013

Arikunto, Suharsimi. (1998). Prosedur Penelitian, Rineka Cipta: Yogyakarta.

Edwards III, G.C. and Sharkansky, I. 2002. The olicy Predicement. W.H. Freeman and Company. San Francisco

Grindle, Marilee S. (ed.). 2003. Politics and Apolocy Implementtaion in The Third World. Prenticetown University Press. New Jersey

Kamil. Mohammad. 1999. Interaksi Sosial Dalam Pengajaran CBSA, Proyek Pengadaan Sarana Akademis Depdikbud RI, Jakarta: Depdikbud

Milles & Huberman. (1992). Analisis Data Kualitatif (tentang metode-metode baru), Jakarta: UI-Press.

Moleong, Lexy.J. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Rosdakarya.

Moleong, Lexy J. (2001). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, Bandung: CV. Alfabeta.

Supardi. (2006). Metodologi Penelitian, Mataram : Yayasan Cerdas Press.

Winarno, Budi. (1989). Teori Kebijaksanaan Publik. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Studi Sosial, Universitas Gajah Mada.

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dalam bidang pendidikan

Undang undang nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi khusus Aceh

Undang-undang Sistim Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Propinsi Aceh